

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Nasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran: Studi Komparatif Provinsi Sumatera Utara & Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Lilis Febiola¹, Nazira Maulidia Nasution², Armin Rahmansyah Nasution³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan
e-mail: lilisfebiola.7241240022@mhs.unimed.ac.id¹,
maulidianazira434@gmail.com², armin@unimed.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif kebijakan pengembangan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan cara menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Sumatera Utara serta Aceh selama periode 2019–2024. Studi ini bersifat komparatif dan menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tiga indikator utama yang dianalisis yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kedua daerah mengalami tekanan ekonomi yang signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, tetapi berhasil melakukan pemulihan secara bertahap mulai dari tahun 2021. Sumatera Utara menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan Aceh, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun penurunan tingkat kemiskinan, meskipun keduanya menunjukkan kecenderungan konvergensi yang positif menjelang tahun 2024. Aceh masih menghadapi tantangan struktural dengan jumlah penduduk miskin mencapai 14,23% pada tahun 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Utara yang hanya 7,99%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan nasional melalui program perlindungan sosial, investasi infrastruktur, dan pengembangan sektor unggulan lokal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi, walau perbedaan antarprovinsi masih harus mendapat perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan, Pengangguran, Evaluasi Kebijakan, Sumatera Utara, Aceh

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of national development policies in promoting equitable economic growth by reducing poverty and poverty rates in North Sumatra and Aceh Provinces during the 2019–2024 period. This study is comparative and applies a quantitative descriptive approach, using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). Three main indicators are described: economic growth rate, the proportion of the population living in poverty, and the open poverty rate (TPT). The study findings indicate that both regions experienced significant economic pressure in 2020 due to the COVID-19 pandemic, but managed to gradually recover starting in 2021. North Sumatra performed better than Aceh, both in terms of economic growth and poverty reduction, although both showed a positive convergence trend towards 2024. Aceh still faces funding challenges with the number of poor people reaching 14.23% in 2024, much higher than North Sumatra alone at 7.99%. This study concludes that national development policies through social protection programs, infrastructure investment, and the development of local leading sectors play a crucial role in

increasing the inclusiveness of economic growth, although differences between provinces still require serious attention from both the central and regional governments.

Keywords: Inclusive Economic Growth, Poverty, Poverty, Policy Evaluation, North Sumatra, Aceh

LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menetapkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai prioritas utama untuk pembangunan nasional Indonesia. Pertumbuhan ekonomi harus mencapai tujuan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selain meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Setelah pandemi COVID-19 merebak pada awal tahun 2020, tantangan pembangunan yang inklusif ini menjadi semakin sulit. Hal ini berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Dua entitas regional di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda, namun keduanya menghadapi masalah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kapasitas fiskal dan kelembagaan Sumatera Utara lebih besar dibandingkan Aceh karena basis ekonominya yang lebih variatif, termasuk pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan keistimewaan konstitusional kepada Aceh, yang memberikan otonomi khusus dan alokasi dana untuknya, namun Aceh masih menghadapi masalah kemiskinan struktural yang terus-menerus.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ada perbedaan yang signifikan antara kedua provinsi ini. Tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 14,23% pada tahun 2024 masih jauh melampaui tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 7,99%. Selain itu, selama periode 2019–2024, perekonomian Sumatera Utara terus berkembang lebih cepat dibandingkan Aceh. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana kebijakan pembangunan nasional yang umum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang unik dan kontekstual di setiap daerah.

Dalam siklus kebijakan publik, evaluasi kebijakan menjadi penting dan dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan akuntabilitas dan pembelajaran dari institusi. Tujuan evaluasi tidak hanya untuk menilai seberapa baik suatu program berjalan, tetapi juga untuk menemukan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi baik tidaknya penerapan kebijakan di tingkat daerah yang berjalan (Dunn, 2018). Studi komparatif yang relevan tentang Sumatera Utara dan Aceh dilakukan dalam konteks ini. Tujuan dari studi ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan sensitif terhadap konteks lokal.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengemukakan bagaimana pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran berkembang di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh selama periode 2019–2024; (2) seberapa efektif kebijakan pembangunan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di kedua provinsi tersebut; dan (3) menemukan alasan mengapa terdapat perbedaan dalam pembangunan di kedua provinsi tersebut dan membuat rekomendasi kebijakan yang relevan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode perbandingan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa deret waktu dari tahun 2019 hingga 2024 yang diambil dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, BPS Provinsi Aceh, dan BPS Pusat. Tiga variabel kunci yang dianalisa meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi dalam persen (%); (2) persentase warga yang hidup di bawah garis kemiskinan (%); dan (3) tingkat pengangguran terbuka atau TPT (%).

Proses analisis data dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah pertama adalah melakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan perkembangan ketiga indikator

di masing-masing provinsi selama periode analisis. Langkah kedua adalah melakukan analisis komparatif untuk membandingkan hasil pembangunan antara Sumatera Utara dan Aceh. Langkah ketiga adalah melaksanakan analisis tren untuk menemukan pola perkembangan serta proyeksi pemulihan setelah pandemi. Langkah keempat adalah melakukan analisis kesenjangan untuk menilai perbedaan dalam pembangunan antarprovinsi dan menghubungkannya dengan konteks pelaksanaan kebijakan nasional. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan secara naratif dengan merujuk pada kerangka teori pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta evaluasi kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2024

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2019-2024 (%)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
Aceh	4,15	-0,37	2,81	4,21	4,23	4,66

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Aceh

Tabel 1. Menunjukkan tren yang sejalan dalam pertumbuhan ekonomi kedua provinsi. Pada tahun 2020, perekonomian kedua provinsi mengalami kontraksi yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Sumatera Utara mencatat kontraksi sebesar -1,07%, sedangkan Aceh mengalami kontraksi yang lebih ringan, sebesar -0,37%. Namun, kontraksi nasional yang lebih dalam secara absolut disebabkan oleh struktur ekonominya yang lebih terbuka dan keterlibatannya dengan rantai pasokan.

Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021, dengan pertumbuhan 2,61 persen di Sumatera Utara dan 2,81 persen di Aceh. Tren pemulihan berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan Sumatera Utara mencapai 5,03 persen pada tahun 2024, hampir sama dengan angka pra-pandemi sebesar 4,15% pada tahun 2019, dan Aceh tumbuh 4,66 persen, sedikit di bawah angka pra-pandemi sebesar 4,15%, dan bahkan melampaui angka tahun 2019. Selama bertahun-tahun, Sumatera Utara meningkat lebih banyak dibandingkan Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomiannya lebih kuat dan responsif.

Perkembangan Tingkat kemiskinan Tahun 2019-2024

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2019-2024 (%)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15	7,99
Aceh	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45	14,23

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Aceh

Tingkat kemiskinan antara kedua provinsi sangat berbeda, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2. Angka kemiskinan di Aceh secara konsisten hampir dua kali lipat dibandingkan Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, kemiskinan Aceh mencapai 15,32% dibandingkan 8,83% di Sumatera Utara. Pada tahun 2020–2021, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, dengan Aceh mencatat 15,33% pada tahun 2021 dan Sumatera Utara juga mencatat peningkatan sementara menjadi 9,01% pada tahun 2021.

Kedua menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan setelah 2021. Pada tahun 2024, kemiskinan di Sumatera Utara telah berkurang menjadi 7,99%, sementara di Aceh masih 14,23%. Ini adalah hasil dari sejumlah faktor struktural, seperti ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian subsisten, rendahnya penyerapan investasi swasta, dan masalah

geografis dan institusional setelah konflik. Meskipun sejumlah besar dana untuk otonomi khusus telah dialokasikan, tingkat keberhasilan mereka dalam mengurangi kemiskinan secara struktural masih perlu ditingkatkan.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2024

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2019-2024 (%)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60
Aceh	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03	5,75

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Aceh

Dibandingkan dengan indikator kemiskinan, perbedaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara Sumatera Utara dan Aceh tidak terlalu besar selama periode pengamatan. Pada tahun 2019, TPT Sumatera Utara sebesar 5,39% dan Aceh sebesar 6,17%. Karena pandemi, TPT kedua provinsi naik pada tahun 2020, dengan TPT Sumatera Utara mencapai puncaknya di 6,91% dan TPT Aceh di 6,59%. Sejak tahun 2021, tren pemulihan berlanjut, dan pada tahun 2024 TPT Sumatera Utara turun menjadi 5,60% dan Aceh turun menjadi 5,75%.

Tingkat pengangguran di Aceh melampaui Sumatera Utara dari tahun 2021 hingga 2024 dengan perbedaan yang semakin mengecil, bahkan mendekati konvergensi pada tahun 2024. Fenomena ini dapat disebabkan oleh peningkatan program padat karya, pertumbuhan ekonomi pesantren, dan penerapan kebijakan ketenagakerjaan khusus Aceh yang didukung oleh peraturan syariah. Namun perlu diingat bahwa angka TPT yang rendah tidak selalu menunjukkan kualitas lapangan kerja yang memadai, karena banyak pekerja terserap ke sektor informal, yang memiliki upah yang rendah dan tidak produktif.

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Implikasinya

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Dana Desa, Kartu Prakerja, dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang beroperasi sejak tahun 2020 memiliki dampak langsung terhadap ketiga indikator tersebut. Program-program ini mencakup berbagai sektor dan bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mengurangi kemiskinan struktural, dan mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Pemulihan yang lebih cepat di Sumatera Utara didorong oleh kerja sama kebijakan nasional dan kapasitas fiskal daerah yang lebih kuat. Koridor Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo (Mebidangro), pengembangan kawasan industri, dan pengembangan sektor pariwisata Danau Toba mendorong penyerapan energi kerja dan pertumbuhan inklusif. Meskipun dana otonomi khusus di Aceh mencapai triliunan rupiah setiap tahun, masalah tata kelola, kelemahan kemampuan, dan rendahnya realisasi investasi tetap menjadi kendala utama dalam mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi berkurangnya kemiskinan yang signifikan.

Studi komparatif ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan bottom-up kontekstual dan responsif terhadap karakteristik daerah harus disertakan dengan kebijakan pembangunan top-down dan generik. Menurut teori pertumbuhan inklusif (Ranieri & Ramos, 2013), pertumbuhan yang berkualitas harus disertai dengan pengurangan persepsi multidimensi, akses yang setara terhadap peluang ekonomi, dan distribusi keuntungan yang merata. Baik Sumatera Utara maupun Aceh masih menghadapi banyak masalah dalam hal ini.

Analisis Korelasi Antar-Indikator Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hubungan fungsional antara laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dan pengangguran merupakan komponen penting dari studi pertumbuhan ekonomi inklusif. Konsep pertumbuhan pro-miskin dikenal dalam teori ekonomi pembangunan, yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang sebanding atau bahkan lebih besar bagi masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat kaya (Klasen,

2010). Secara deskriptif komparatif, analisis hubungan antara peningkatan PDRB dan perubahan angka kemiskinan dan kemiskinan di kedua provinsi dilakukan untuk mengkaji hal ini. Analisis ini dilakukan berdasarkan data panel dari tahun 2019 hingga 2020.

Di Sumatera Utara, hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tampak relatif konsisten. Ketika pertumbuhan ekonomi kembali positif pada 2022 (4,73%) dan 2023 (5,01%), angka kemiskinan turun dari 9,01% (2021) menjadi 8,42% (2022) dan 8,15% (2023). Ini mengindikasikan bahwa setiap satu persen peningkatan pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penurunan kemiskinan secara bertahap. Pola ini konsisten dengan temuan Dollar dan Kraay (2002) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata meningkatkan pendapatan kelompok miskin secara proporsional, terutama apabila pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor padat karya seperti manufaktur dan perdagangan.

Di Aceh, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan bersifat lebih lemah. Meskipun pertumbuhan ekonomi kembali positif sejak 2021, penurunan kemiskinan berlangsung lebih lambat dibandingkan Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi di Aceh belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok miskin atau belum mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah yang memadai. Fenomena ini dalam literatur pembangunan dikenal sebagai “growth without inclusion” — pertumbuhan tanpa inklusi — di mana manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok penduduk menengah ke atas (Ianchovichina & Lundstrom, 2009).

Di kedua provinsi, pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang lebih kompleks. Menurut hukum Okun, setiap peningkatan 1% dalam pertumbuhan output akan menghasilkan penurunan kemiskinan sebesar sekitar 0,5% (Okun, 1962). Namun elastisitas terlihat lebih rendah di kedua provinsi ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih banyak didorong oleh sektor padat modal yang tidak menyerap banyak tenaga kerja. Data menunjukkan penurunan TPT Sumatera Utara secara bertahap dari 6,91% (2020) menjadi 5,60% (2024) meskipun pertumbuhan ekonomi telah kembali kuat sejak tahun 2022.

Indeks Pembangunan Manusia dan Dimensi Ketimpangan Antarprovinsi

Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah dengan melihat tingkat kemiskinan dan pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat oleh UNDP dan merupakan alat untuk mengukur berbagai hal, termasuk standar hidup layak (pengeluaran per kapita), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan kesehatan (angka harapan hidup). IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas inklusi pembangunan karena merefleksikan apakah pertumbuhan ekonomi secara nyata telah meningkatkan kesejahteraan manusia (Sen, 1999).

IPM Sumatera Utara pada tahun 2024 mencapai 74,65, termasuk dalam kategori “tinggi”, sedangkan IPM Aceh mencapai 73,28. Angka-angka ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal kualitas pendidikan, kemampuan daya beli masyarakat, dan akses layanan kesehatan, meskipun selisihnya tidak terlalu besar dalam nilai absolut. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Sumatera Utara lebih merata, dengan pusat layanan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Sebaliknya, layanan dasar di Aceh masih terkonsentrasi di kota-kota seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, sementara kabupaten-kabupaten di pedalaman seperti Gayo Lues dan Aceh Singkil masih memiliki akses yang sangat terbatas.

Faktor penting lainnya yang harus dipertimbangkan adalah disparitas antar provinsi. Koefisien Gini Sumatera Utara adalah 0,32–0,34 dari 2019–2024, dan Aceh adalah 0,30–0,32. Angka Gini yang relatif lebih rendah di Aceh mungkin tidak segera menunjukkan kondisi yang lebih baik; sebaliknya, hal ini mungkin menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata pada tingkat yang lebih rendah secara absolut, yang berarti kemiskinan yang merata daripada kesejahteraan yang merata. Dalam literatur ekonomi pembangunan, fenomena ini disebut sebagai “sebanding kurang” (Chambers, 2014).

Selama bertahun-tahun, disparitas antarprovinsi ini menunjukkan bahwa konvergensi pembangunan tidak terjadi di tingkat regional Sumatera. Menurut teori konvergensi neoklasik

(Barro & Sala-i-Martin, 1992) karena modal per kapita yang lebih rendah, wilayah yang lebih miskin seharusnya tumbuh lebih cepat daripada wilayah yang lebih kaya. Hal ini menyebabkan produktivitas marjinal investasi meningkat di wilayah-wilayah ini. Namun, data empiris dari kedua provinsi menunjukkan pola yang sebaliknya: Sumatera Utara, yang relatif lebih maju, secara konsisten tumbuh lebih cepat daripada Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti iklim investasi, modal manusia, kualitas institusi, dan infrastruktur memiliki Dampak yang jauh lebih besar daripada yang diprediksi oleh teori konvergensi sederhana.

Faktor Determinan Disparitas Pembangunan Antara Sumatera Utara dan Aceh

Selama periode pengamatan, ada banyak faktor penentu yang secara struktural menjelaskan mengapa perbedaan pembangunan antara Sumatera Utara dan Aceh tetap ada. Empat dimensi utama terdiri dari komponen ini: (1) kapasitas investasi dan fiskal; (2) struktur ekonomi dan diversifikasi; (3) kualitas sumber daya manusia; dan (4) kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah.

Jika dibandingkan dengan Aceh, Sumatera Utara memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar sebagai proporsi dari APBD, yang menunjukkan bahwa perekonomiannya lebih mandiri. Meskipun menerima banyak dana otonomi khusus, Aceh menghadapi masalah karena kapasitas fiskal asli yang rendah. Terlalu bergantung pada transfer pusat, seperti dana otonomi khusus, meningkatkan risiko fiskal dan menghambat pertumbuhan basis pajak daerah. Selain itu, belanja modal Aceh seringkali tidak mencapai target, yang menunjukkan kendala dalam penyerapan anggaran.

Dalam hal struktur ekonomi, Sumatera Utara memiliki komposisi PDRB yang lebih terdiversifikasi, sebagian besar disebabkan oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi, dan perkebunan pertanian, khususnya karet dan kelapa sawit. Diversifikasi membuat perekonomian lebih tahan terhadap guncangan sektoral. Sebaliknya, dengan basis industri pengolahan yang sangat terbatas, perekonomian Aceh masih bergantung pada sektor pertanian subsisten dan konstruksi yang didorong oleh belanja pemerintah. Tidak ada industri besar yang mampu menyerap banyak tenaga kerja setelah berakhirnya operasi tambang Exxon Mobil di Aceh Utara pada tahun 2001.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah faktor ketiga yang sangat penting. Dengan banyaknya perguruan tinggi negeri dan swasta berkualitas tinggi di Medan, termasuk Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), dan sejumlah politeknik industri, Sumatera Utara memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Pasokan profesional ini meningkatkan daya tarik investasi dan kemampuan inovasi ekonomi daerah. Meskipun ada Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Aceh, lulusan perguruan tinggi sering diterima oleh sektor swasta, menyebabkan kemiskinan atau migrasi ke luar daerah.

Tidak adanya konsistensi yang ada juga dipengaruhi oleh dimensi keempat, yaitu kapasitas kelembagaan dan tata kelola. Meskipun ada beberapa masalah, Sumatera Utara lebih baik untuk berinvestasi daripada Aceh, menurut indeks tata kelola pemerintahan, yang menilai efektivitas regulasi, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Meskipun syariat Islam di Aceh adalah hak konstitusional yang sah, dalam beberapa kasus, menimbulkan keraguan tentang regulasi bagi investor asing yang tidak akrab dengan kerangka hukum setempat. Untuk meningkatkan kepercayaan investor, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih besar dan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat.

Implementasi Kebijakan Sektoral dan Dampaknya terhadap Inklusivitas

Kebijakan pembangunan nasional dilaksanakan melalui serangkaian program sektoral yang secara langsung mempengaruhi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Penting untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan sektoral ini agar dapat memahami bagaimana pengaruh kebijakan makro pada tingkat nasional terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi di daerah. Terdapat lima bidang kebijakan sektoral yang sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks kedua provinsi, yaitu: (1) perlindungan sosial; (2) infrastruktur;

(3) pertanian dan ketahanan pangan; (4) investasi serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan (5) pendidikan dan pelatihan vokasi.

Dalam aspek perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berfungsi sebagai instrumen utama untuk memastikan konsumsi kelompok yang kurang mampu. Di Sumatera Utara, pada tahun 2023, cakupan PKH mencapai lebih kurang 680.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan di Aceh angka tersebut sekitar 230.000 KPM. Meski secara proporsional terhadap total penduduk miskin cakupan di Aceh terbilang memadai, tantangan muncul terkait keakuratan dan pembaruan data penerima. Data kemiskinan yang tidak tepat akibat kelemahan dalam sistem basis data terpadu (DTKS) dapat menyebabkan exclusion error (masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan) maupun inclusion error (masyarakat yang tidak miskin justru menerima bantuan), yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas program.

Di sektor infrastruktur, konstruksi Jalan Tol Trans-Sumatera yang melintasi Sumatera Utara memberikan dampak berganda yang signifikan terhadap efisiensi logistik, penurunan biaya distribusi, dan peningkatan konektivitas ekonomi antar daerah. Bagian Medan-Binjai dan Tebing Tinggi-Indrapura yang telah beroperasi memberikan kontribusi pada pengurangan biaya transportasi barang serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar regional maupun nasional.

Sebaliknya, meskipun mendapat dana otonomi khusus yang signifikan, pengembangan infrastruktur di Aceh menghadapi masalah terkait kualitas pembangunan, pemeliharaan, dan kurangnya perencanaan yang terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi yang produktif lokal.

Dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan, kedua provinsi memiliki prospek yang besar namun dengan tingkat modernisasi yang bervariasi. Sumatera Utara telah mengembangkan sektor agribisnis yang fokus pada kelapa sawit, karet, dan hortikultura dengan teknologi pengolahan yang lebih maju, serta akses yang lebih baik ke pasar internasional melalui Pelabuhan Belawan. Sedangkan di Aceh, sektor pertaniannya didominasi oleh padi serta tanaman perkebunan seperti kopi Gayo, kakao, dan nilam, namun perkembangan rantai nilainya yang masih terbatas menyebabkan petani sering kali menjual hasil panen dalam kondisi mentah dengan harga yang rendah. Peluang untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan agroindustri berbasis pada komoditas lokal unggulan adalah hal strategis yang belum dimanfaatkan sepenuhnya di Aceh.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar penting dalam kebijakan yang inklusif, mengingat UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi & UKM, 2023). Di Sumatera Utara, ekosistem UMKM didukung oleh adanya lembaga keuangan mikro, koperasi, dan beragam program inkubasi bisnis yang lebih terintegrasi. Di Aceh, meskipun terdapat banyak UMKM, namun akses ke pendanaan formal masih cukup terbatas, terlebih lagi dengan regulasi perbankan syariah yang menjadi satu-satunya solusi bagi usaha kecil. Masalah literasi keuangan dan kurangnya produk pembiayaan syariah yang inovatif mengakibatkan hambatan struktural yang perlu ditangani melalui kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pesantren sebagai penggerak ekonomi dalam komunitas.

Dalam dunia pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja, inisiatif Kartu Prakerja yang diluncurkan pada tahun 2020 telah membawa efek positif dalam meningkatkan skill tenaga kerja yang terpengaruh oleh pandemi di kedua provinsi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesesuaian pelatihan yang diberikan dengan permintaan pasar kerja setempat. Di Sumatera Utara, kebutuhan di sektor manufaktur, logistik, dan pariwisata meningkatkan permintaan untuk pelatihan teknis yang spesifik, sementara di Aceh, perhatian lebih ditujukan pada sektor agribisnis, konstruksi, dan ekonomi syariah. Ketidakcocokan antara penyediaan pelatihan yang bersifat umum secara nasional dengan kebutuhan lokal yang lebih spesifik adalah salah satu kelemahan yang harus diperbaiki dalam perancangan program ketenagakerjaan di tingkat nasional.

Dampak Pandemi COVID-19 dan Pola Pemulihan Ekonomi Regional

Wabah COVID-19 yang menyerang Indonesia sejak Maret 2020 membawa konsekuensi ekonomi yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah pembangunan setelah kemerdekaan. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai kebijakan yang membatasi mobilitas telah mengakibatkan terhentinya aktivitas di sektor-sektor ekonomi utama, terutama dalam bidang pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Sumatera Utara (-1,07%) dan Aceh (-0,37%) pada tahun 2020 mencerminkan besarnya dampak eksternal yang terjadi serentak dan simetris di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai respons, pemerintah menunjukkan langkah dengan meluncurkan paket kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bernilai ratusan triliun rupiah. Paket ini meliputi subsidi dan bantuan sosial, dukungan untuk UMKM, insentif bagi dunia usaha, serta pembiayaan untuk sektor korporasi. Di Sumatera Utara, penerapan kebijakan ini didukung oleh sistem birokrasi yang cukup efisien, sehingga penyaluran bantuan sosial dan stimulasi ekonomi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Sementara itu, di Aceh, meskipun anggaran yang tersedia sudah memadai, kesulitan dalam tata kelola distribusi bantuan mengakibatkan sebagian dari manfaat PEN tidak dirasakan secara optimal oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Pola pemulihan ekonomi yang berbeda antara kedua provinsi juga tampak dari laju kembalinya indikator ke tingkat sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara hampir mencapai angka sebelum pandemi pada 2023 (5,01% dibandingkan 5,22% pada 2019), sedangkan Aceh sudah mencatat angka 2019 dan bahkan melebihinya pada 2024 (4,66% dibandingkan 4,15%). Untuk indikator kemiskinan, kedua provinsi masih berada dalam tahap pemulihan menuju level sebelum pandemi, dengan Sumatera Utara yang telah melampaui angka sebelum pandemi (7,99% pada 2024 dibandingkan 8,83% pada 2019), sedangkan Aceh juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di bawah angka 2019 meskipun penurunannya lebih lambat (14,23% dibandingkan 15,32%). Hal ini menunjukkan bahwa meski pandemi memberikan tantangan yang signifikan, kebijakan pemulihan nasional secara keseluruhan berhasil menciptakan tren positif di kedua provinsi.

Salah satu pelajaran berharga yang diambil dari pengalaman pandemi COVID-19 adalah pentingnya membangun ketahanan ekonomi regional yang tidak hanya mengandalkan satu atau dua sektor utama. Wilayah yang memiliki keberagaman ekonomi yang lebih tinggi terbukti mampu pulih lebih cepat. Ini memperkuat pendapat bahwa kebijakan pembangunan jangka panjang harus secara berkelanjutan mendukung transformasi struktural ekonomi daerah menuju sektor-sektor yang produktif dengan nilai tambah yang tinggi serta ketahanan terhadap guncangan dari luar.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Setelah menganalisis situasi yang ada, ada beberapa kebijakan yang bisa diusulkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di kedua provinsi dengan lebih efisien. Usulan ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing daerah dan kebijakan nasional yang sedang berjalan.

Pertama, untuk Provinsi Aceh, langkah utama yang harus diambil adalah penguatan manajemen dana otonomi khusus. Pengelolaan dana otonomi khusus yang efisien bisa menjadi pendorong utama bagi perkembangan. Pemerintah Aceh perlu memperbaiki sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil, meningkatkan kemampuan aparat dalam mengelola anggaran, dan memperkuat mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Mengalokasikan lebih banyak dana otonomi khusus ke sektor-sektor produktif seperti pertanian modern, agroindustri, dan pariwisata halal akan lebih bermanfaat dalam menciptakan peluang kerja dan mengurangi kemiskinan dibandingkan jika dana tersebut diarahkan ke infrastruktur fisik yang tidak terhubung dengan kebutuhan ekonomi yang produktif.

Kedua, baik Sumatera Utara maupun Aceh perlu memfasilitasi digitalisasi UMKM sebagai metode untuk mempercepat pertumbuhan yang inklusif. Transformasi digital

memberikan akses yang lebih luas ke pasar bagi pelaku usaha kecil, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi tradisional yang sering kali merugikan produsen lokal, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dukungan dari pemerintah dapat berupa pelatihan digital, penyediaan koneksi internet yang baik di daerah pedesaan, dan insentif pajak bagi UMKM yang beralih ke platform digital. Pembangunan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, termasuk e-commerce pertanian dan sistem pembayaran digital berbasis syariah di Aceh, harus menjadi prioritas dalam agenda kebijakan.

Ketiga, penguatan sistem perlindungan sosial yang fleksibel dan responsif terhadap guncangan harus ditingkatkan terus-menerus. Krisis COVID-19 menunjukkan betapa rentannya sistem perlindungan sosial saat ini dalam mengenali dan menjangkau kelompok yang lemah dengan cepat dan tepat. Pembaruan serta validasi data DTKS secara teratur, integrasi data antara lembaga, dan pengembangan mekanisme perlindungan sosial yang dapat diaktifkan secara otomatis saat terjadi krisis adalah investasi institusional yang sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin di kedua provinsi.

Keempat, kerjasama antar daerah di kawasan Sumatera perlu diperkuat melalui sebuah kerangka kolaborasi ekonomi regional yang lebih terstruktur. Terdapat potensi komplementaritas ekonomi yang signifikan antara Sumatera Utara dan Aceh: Sumatera Utara memiliki kekuatan dalam industri pengolahan serta jaringan distribusi yang kokoh, sementara Aceh kaya akan sumber daya alam dan komoditas pertanian. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang melintasi provinsi, khususnya di koridor pantai barat Sumatera, dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan potensi ekonomi kedua provinsi secara sinergis dan saling menguntungkan, sekaligus mempercepat konvergensi pembangunan dalam jangka panjang.

Kelima, dalam kebijakan di tingkat nasional, pemerintah pusat perlu memikirkan revisi terhadap formula alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar lebih peka terhadap tingkat kemiskinan serta disparitas pembangunan antar daerah. Saat ini, formula yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembangunan daerah yang menghadapi tantangan kemiskinan struktural yang lebih berat. Penetapan bobot yang lebih tinggi bagi indikator kemiskinan dan ketimpangan dalam formula Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa menjadi alat redistribusi fiskal yang lebih efisien untuk mendorong konvergensi pembangunan antarprovinsi, sejalan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif.

SIMPULAN

Menurut penelitian ini, kebijakan pembangunan nasional membantu pertumbuhan ekonomi inklusif di Aceh dan Sumatera Utara, tetapi dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Indikator utama ketiga menunjukkan peningkatan kinerja di Sumatera Utara, sementara Aceh masih menghadapi kemiskinan struktural yang berkelanjutan. Kebijakan pemulihan pascapandemi telah menunjukkan kemampuan secara bertahap menjamin tren negatif di kedua provinsi. Disarankan agar pemerintah mengadopsi kebijakan yang lebih mempertimbangkan keadaan khusus Aceh, terutama dalam hal manajemen dana otonomi khusus Aceh, meningkatkan investasi produktif, dan meningkatkan sumber daya manusia yang fokus pada kebutuhan pasar kerja lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2024). Aceh Dalam Angka 2024. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). Sumatera Utara Dalam Angka 2024. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Chambers, R. (2014). Rural Development: Putting the Last First. London: Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge.
- Ianchovichina, E., & Lundstrom, S. (2009). Inclusive growth analytics: Framework and application. World Bank Policy Research Working Paper No. 4851.

- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Bappenas.
- Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals. ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 12.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- McKinley, T. (2010). Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 14.
- Nugroho, R. (2020). Kebijakan Publik di Indonesia: Substansi, Konteks, dan Strategi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, P. E. (2019). The role of government and social capital in improving the human development. *Economics & Sociology*, 12(2), 133–148.
- Ranieri, R., & Ramos, R. A. (2013). Inclusive growth: Building up a concept. International Policy Centre for Inclusive Growth Working Paper No. 104.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sinaga, M. L. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2010–2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 78–92.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris: CMEPSP.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). London: Pearson Education.
- UNDP Indonesia. (2023). *Human Development Report Indonesia 2023*. Jakarta: UNDP.
- Wahyudi, T. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan program keluarga harapan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 45–62.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Resilience Amid Global Uncertainty*. Washington DC: World Bank Group.